

**OPTIMALISASI INTEGRASI PEMANFAATAN NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN DALAM MENDUKUNG KECEPATAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

Daniar Rizky Mahardika

NPP. 30.0789

*Asdaf Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur*

*Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: dnrrzk17@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. H. Romli Arsad, SH., M.Hum

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background:** Utilization of population data is an innovation issued by the Ministry of Home Affairs to provide excellent service to the community. With advances in technology, the government is certainly trying to provide the best service for the community. Utilization of data is one of the government's efforts to provide the best service, namely by utilizing the National Identity Number (NIK) in services. The Ministry of Home Affairs has established regulations related to data utilization with the aim that all local governments can use access rights to utilize NIK as a key in services. In the City of Mojokerto, the use of NIK has been used in various services in several OPDs or private agencies. With the innovation of using NIK data, the provision of services to the community becomes faster and more effective. **Purpose:** This study aims to determine the optimization of NIK utilization in supporting the acceleration of public services, obstacles in the optimization process and efforts to overcome them. **Methods:** This study uses Optimization theory according to Hotniar Siringoringo with three dimensions namely goals, decision alternatives, and limited resources and uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach and data collection techniques in the form of observations, interviews and documentation. **Results:** The results of this study indicate that the objective of optimizing the utilization of NIK has not been fulfilled while alternative decisions have been implemented as expected even though the supporting resources have not been adequate. **Conclusion:** With the use of NIK, service delivery will be faster and more effective. From these results, the authors provide suggestions, namely to improve the quality of facilities and infrastructure to support service delivery and conduct socialization regarding the use of NIK both to the community and to OPD or related agencies. **Keywords:** Optimization, Data Utilization, National Identity Number

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang:** Pemanfaatan data kependudukan merupakan sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, pemerintah tentu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemanfaatan data menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik, yaitu dengan memanfaatkan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dalam pelayanan. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan peraturan terkait pemanfaatan data dengan tujuan agar seluruh pemerintah daerah dapat menggunakan hak akses untuk memanfaatkan NIK sebagai kunci dalam pelayanan. Di Kota Mojokerto, pemanfaatan NIK telah digunakan dalam berbagai pelayanan di beberapa OPD atau instansi swasta. Dengan adanya inovasi pemanfaatan data NIK, pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan NIK dalam mendukung percepatan pelayanan publik, hambatan dalam proses optimalisasi serta upaya untuk mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Optimalisasi menurut Hotniar Siringoringo dengan tiga dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari optimalisasi pemanfaatan NIK belum terpenuhi sedangkan alternatif keputusan telah terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan meskipun sumber daya penunjang belum cukup memadai. **Kesimpulan:** Dengan adanya pemanfaatan NIK, maka pemberian pelayanan akan lebih cepat dan efektif. Dari hasil tersebut, penulis memberikan saran yaitu agar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sebagai penunjang pemberian pelayanan serta melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan NIK baik kepada masyarakat maupun kepada OPD atau instansi terkait.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Pemanfaatan Data, Nomor Induk Kependudukan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 mengatur terkait hak akses pemanfaatan data. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam sambutan pada Acara Forum Diskusi (FGD), bagi dinas yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya digunakan sebagai alat verifikasi data, khususnya data kependudukan yang dikaitkan dengan program yang ada di OPD masing-masing. Perangkat daerah dan badan hukum dapat mengakses pemanfaatan data kependudukan dengan menggunakan web portal, web service, atau juga card reader, dan hak akses dibatasi untuk cek data.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Bidang ini bertugas untuk mengelola segala informasi terkait administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu bentuk penerapan tugas dari bidang ini yaitu pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Contohnya yaitu koordinasi dan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan organisasi perangkat daerah lainnya yang membutuhkan data kependudukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan beberapa instansi, maka akan memperluas pemanfaatan database kependudukan. Hal ini dapat terjadi apabila hak akses diberikan kepada instansi lain serta dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya, tidak hanya akan memperluas pemanfaat database, tetapi beberapa instansi juga akan mendapatkan kemudahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh OPD di Kota Mojokerto**  
**Tahun 2022**

NO (1)	NAMA PENGGUNA (2)	JANGKA WAKTU (3)	KETERANGAN (4)
1.	Dinas Sosial	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Proses persetujuan pusat
2.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Proses persetujuan pusat
3.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
7.	Badan Perencanaan Pembangunan	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
8.	Kecamatan Prajurit Kulon	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
9.	Kecamatan Magersari	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
10.	Kecamatan Kranggan	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
12.	RSUD dr. Wahidin SUDIrohusodo	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru

13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru
15.	Dinas Perhubungan	2 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama	Usulan permohonan baru

Sumber: Dispendukcapil Kota Mojokerto (2022)

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa beberapa OPD telah mengajukan permohonan pemanfaatan data kepada Disdukcapil Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan agar OPD tersebut dapat mengakses data kependudukan untuk menunjang pemberian layanan kepada masyarakat.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa masih ada beberapa penduduk yang belum melaporkan peristiwa kelahiran. Akibatnya jika seseorang tidak melaporkan peristiwa kelahiran, maka tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini tentu akan menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat apabila yang bersangkutan tidak memiliki NIK yang nantinya juga akan mempengaruhi dalam pemanfaatan data. Belum terpenuhinya pemberian hak akses kepada instansi atau lembaga pengguna yang mengajukan kerjasama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi salah satu kendala dalam pemberian pelayanan publik.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam pemberian hak akses dan pemanfaatan data, maupun pelayanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penelitian oleh Ahmad Subangkit (2022) dengan judul Adaptasi Inovasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan NIK mengalami 5 tahap yaitu tahapan dimensi pengetahuan, persuasi keputusan, implementasi dan konfirmasi. Penelitian oleh Muhammad Resdy Gery Runtu (2021) dengan judul Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number menemukan bahwa pemanfaatan data dan informasi kependudukan melalui SIAK di Kota Parepare belum dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dalam penggunaan data dan informasi SIAK.

Penelitian oleh Ilham Putra Madani (2022) dengan judul Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari telah optimal dalam pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dan belum dilaksanakan oleh penelitian terdahulu. Konteks penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu Optimalisasi Integrasi

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dalam Mendukung Kecepatan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengukuran indikator optimalisasi menurut Teori Hotniar Siringoringo (2015) yang mengungkapkan bahwa optimalisasi terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi tujuan, dimensi alternatif keputusan dan dimensi sumber daya yang dibatasi. Selain itu fokus penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu berfokus pada pemanfaatan data kependudukan yang mana dalam hal ini adalah NIK dalam mendukung kecepatan pelayanan publik di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam optimalisasi pemanfaatan data kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan dalam pelayanan masyarakat sudah optimal, faktor yang menghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan optimalisasi integrasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam mendukung kecepatan pelayanan publik di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menurut Creswell (2016:4) menjelaskan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendalami serta memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap bersumber dari masalah social atau kemanusiaan sehingga proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting serta pengumpulan data spesifik dan partisipan agar bisa menganalisis data secara induktif. Creswell dalam buku *Research Design* (2016:3) menjelaskan bahwa ada tiga jenis rancangan penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran yang pada hakikatnya ketiga jenis pendekatan penelitian ini tidak terpisah satu sama lain. Terdapat perbedaan dari ketiga metode penelitian tersebut yang dapat dilihat dari pengertian dari masing-masing metode, sehingga dapat diketahui metode yang paling tepat untuk dilakukan dalam melakukan penelitian harus ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi PP, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan data, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Kerja Sama, Kepala Seksi pengolahan data, Operator SIAK, dan Masyarakat (3 orang). Adapun analisisnya, peneliti menggunakan analisa berdasarkan tinjauan teoritis Hotniar Siringoringo mengenai teori optimalisasi sehingga 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pelaksanaan Optimalisasi integrasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam mendukung kecepatan pelayanan publik di Kota Mojokerto menggunakan teori optimalisasi menurut Hotniar Siringoringo yang menyatakan suatu program dinyatakan optimal dengan melihat beberapa dimensi sebagai berikut:

### **3.1 Optimalisasi Integrasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam Mendukung Kecepatan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto**

#### **3.1.1 Tujuan**

Sesuai dengan penjelasan Siringoringo (2005), tujuan merupakan salah satu dari dimensi optimalisasi yang terbagi menjadi dua indikator yaitu maksimalisasi dan minimalisasi. Maksimalisasi tujuan yang dimaksud yaitu memaksimalkan beberapa hal terkait dengan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan seperti penggunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan, serta meningkatkan pemberian pelayanan kependudukan. Sedangkan minimalisasi tujuan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan menghemat waktu dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan dua indikator dari tujuan optimalisasi dan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah menunjukkan adanya perubahan dan inovasi terkait informasi administrasi kependudukan yang menunjang pemberian pelayanan publik.

#### **3.1.2 Alternatif Keputusan**

Terdapat dua indikator yaitu alternatif keputusan yang efektif dan alternatif keputusan yang efisien. Pertimbangan yang diambil dalam suatu alternatif keputusan yaitu hal yang paling memenuhi kriteria serta memiliki resiko paling kecil dalam penerapannya. Alternatif keputusan dalam hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program pemanfaatan data kependudukan. Alternatif keputusan yang efektif yang berkaitan dengan prosedur pemanfaatan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), termasuk kerja sama dengan OPD lain. Sedangkan untuk alternatif keputusan yang efisien yaitu ketepatan pemberian pelayanan publik sesuai dengan data kependudukan yang telah diakses.

#### **3.1.3 Sumberdaya yang Dibatasi**

Sumber daya yang dimaksud disini bisa berupa fasilitas, bahan baku penunjang maupun tenaga kerja manusia. Dalam hal ini, yang termasuk sumber daya penunjang yaitu kesiapan dari pegawai dalam pemanfaatan NIK yang telah disiapkan oleh Disdukcapil Kota Mojokerto dan OPD terkait. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu kecakapan pegawai dalam memanfaatkan data kependudukan dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat melalui teknologi informasi. Kemudian yang termasuk dalam sumber daya penunjang yaitu adanya ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan serta akses internet dari dinas terkait dalam pemberian pelayanan publik.

### **3.2 Faktor Penghambat Optimalisasi Integrasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam Mendukung Kecepatan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi integrasi pemanfaatan NIK dalam mendukung kecepatan pelayanan publik.

#### **1. Belum Sinkronnya Data Kependudukan**

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan NIK tentu memerlukan sinkronisasi data yang akurat. Tidak terbaruinya data kependudukan mengakibatkan terhambatnya pemberian pelayanan, karena akan menghambat validasi dan verifikasi data.

#### **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Dalam memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan NIK tentu memerlukan sarana dan prasarana seperti computer dan jaringan internet. Beberapa sarana seperti computer dan alat scan KTP di OPD lain atau instansi swasta terkadang mengalami error sehingga menghambat proses pelayanan. Selain itu, prasarana penunjang seperti jaringan internet juga terkadang mengalami gangguan, baik di Disdukcapil maupun OPD atau instansi swasta lainnya. Kendala ini terjadi ketika pengguna dari OPD atau instansi swasta lain akan mengakses data kependudukan dari database. Kendala lain yang ditemui terkait dengan jaringan internet yaitu server dari Disdukcapil yang terkadang mengalami kendala dalam verifikasi dan validasi data, sehingga pelayanan terhambat.

### 3. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan di masyarakat maupun OPD mengakibatkan ketidaktahuan terkait proses pelayanan publik yang baru. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengakibatkan beberapa penduduk yang telah memiliki akte kelahiran masih menggunakan sistem kependudukan local serta penduduk enggan mengurus dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Permasalahan ini tentunya dapat menghambat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **3.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Optimalisasi Integrasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam Mendukung Kecepatan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto**

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, tentu ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang bekerja sama juga dengan beberapa OPD atau instansi swasta terkait

#### 1. Melakukan *Update* Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto diharapkan dapat memastikan bahwa data penduduk sudah diperbarui agar dalam pemberian pelayanan tidak ada kesalahan yang terjadi. Selain itu, Disdukcapil dapat melakukan konsolidasi database kependudukan dengan melakukan pencoretan database kependudukan. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu membersihkan data, baik data penduduk yang telah meninggal, data ganda maupun data yang terekam ganda serta melakukan kerjasama percepatan pelayanan pendaftaran yang meliputi perubahan biodata penduduk.

#### 2. Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto bekerja sama dengan OPD dan instansi swasta untuk melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas. Pemeliharaan ini dimulai dengan pemeliharaan perangkat computer dan card reader atau pembaca chip KTP agar dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Disdukcapil juga melakukan peningkatan kualitas server agar dalam melakukan proses validasi dan verifikasi dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak menghambat jalannya proses pelayanan publik.

#### 3. Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan beberapa OPD atau instansi swasta terkait pemanfaatan data kependudukan. Karena pada dasarnya, e-KTP sudah tidak diperbolehkan untuk diperbanyak melalui fotocopy, seperti yang telah disampaikan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Apabila masih ada dinas atau instansi swasta yang masih menggunakan fotocopy KTP sebagai persyaratan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan di Kota Mojokerto sudah berjalan efektif tetapi belum optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat terkait jalannya pelayanan publik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi integrasi pemanfaatan NIK dalam mendukung kecepatan pelayanan publik. Faktor pertama yang menghambat pemberian pelayanan yaitu tidak terbaruinya data kependudukan yang ditunjukkan dari masih adanya aduan terkait permasalahan NIK saat akan melakukan pelayanan. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ditunjukkan dari masih seringnya alat scan mengalami error maupun jaringan internet yang mengalami gangguan. Faktor penghambat yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan OPD yang ditunjukkan dari masih ditemukannya fotocopy KTP sebagai persyaratan pelayanan.

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta beberapa OPD lain bekerja sama melakukan beberapa upaya. Upaya pertama yang dilakukan yaitu melakukan pembaruan data dan memastikan bahwa data penduduk Kota Mojokerto tidak ada kesalahan. Upaya selanjutnya yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dimulai dari pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan internet serta meningkatkan kualitas server agar dalam proses validasi dan verifikasi dapat dilakukan dengan cepat. Upaya terakhir yang dilakukan yaitu sosialisasi pemanfaatan data kepada masyarakat dan OPD lainnya untuk memberikan edukasi terkait aplikasi pemca akses database kependudukan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa proses optimalisasi belum berlangsung dengan baik, karena berdasarkan ketiga dimensi dari optimalisasi masih terdapat kekurangan. Beberapa dari tujuan optimalisasi belum tercapai oleh Disdukcapil Kota Mojokerto karena masih belum efektifnya sosialisasi sebagai alternatif keputusan bagi pihak Disdukcapil maupun OPD atau instansi swasta terkait. Untuk sumber daya yang dibatasi juga masih menunjukkan adanya kekurangan, terutama pada sarana dan prasarannya

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian yang hanya dilakukan selama 2 (dua) minggu sehingga wawancara dan observasi kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan optimalisasi integrasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam mendukung percepatan pelayanan publik di Kota Mojokerto untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, juga kepada dosen pembimbing, senior, rekan-rekan serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2022). *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto*. Retrieved from <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home>
- Creswell, J. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Madani, I. (2022). Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. (n.d.).
- Runtu, M. R. (2021). Intergrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number. *AMSIR Management Journal*, 53-60.
- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional Pemograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subangkit, Ahmad. (2022). Adaptasi Inovasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 657-668.

